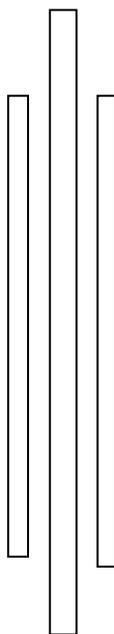




LAPORAN KINERJA BIRO KERJASAMA ANTAR PARLEMEN TAHUN 2017



**JAKARTA, 24 JANUARI 2018
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	lii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kelembagaan	2
C. Struktur Organisasi	3
D. Sumber Daya Manusia	4
E. Aspek Strategis Organisasi	6
F. Sistematika Penyajian	7
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA	9
A. Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan	9
B. Penetapan Kinerja Tahun 2017	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. Pengukuran Capaian Kinerja	15
B. Evaluasi dan Analisis Capaian	18
C. Capaian Kinerja Anggaran	34
BAB IV PENUTUP	39
A. Keberhasilan	39
B. Hambatan dan Masalah	39
C. Pemecahan Masalah	41
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data Aparatur Sipil Negara di Biro Kerjasama Antar Parlemen berdasarkan tingkat Pendidikan tahun 2017	5
Tabel 2	Perjanjian Kinerja Biro KSAP Tahun 2017	12
Tabel 3	Perjanjian Kinerja Biro KSAP (Perubahan) Tahun 2017	13
Tabel 4	Capaian Kinerja Biro KSAP Tahun 2017	15
Tabel 5	Perbandingan Capaian Kinerja Biro KSAP Tahun 2016 dan Tahun 2017	17
Tabel 6	Data Output Dukungan dalam Sidang-sidang Internasional Tahun 2017	27
Tabel 7	Data Output dukungan Kegiatan Biro KSAP dalam Sidang-sidang Regional Tahun 2017	28
Tabel 8	Data Output Dukungan Kegiatan Biro KSAP dalam Kerjasama Bilateral Tahun 2017	30
Tabel 9	Data Output Dukungan Kegiatan Biro KSAP dalam Kegiatan Rapat-rapat Courtesy Call, Friendly Talk BKSAP DPR RI Tahun 2017	31
Tabel 10	Data Output Dukungan Kegiatan Biro KSAP dalam Diplomasi Individu DPR RI Tahun 2017	32
Tabel 11	Data Penerjemahan Tertulis Tahun 2017	32
Tabel 12	Data Penerjemahan Lisan Tahun 2017	33
Tabel 13	Data Persandingan suslan anggaran BKSAP dengan DIPA BKSAP Tahun 2017	35
Tabel 14	Perbandingan Jumlah anggaran sebelum dan setelah APBN-P Tahun 2017	36
Tabel 15	Realisasi Anggaran Tahun 2017	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Biro KSAP	4
Gambar 2	Grafik Data Aparatur Sipil Negara di Biro KSAP Tahun 2017	5
Gambar 3	Grafik Aparatur Sipil Negara di Biro KSAP berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2017	6
Gambar 4	Indikator Kinerja sasaran “Tersedianya Dokumen Materi Kerjasama Antar Parlemen”	19

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945 Pasal 20A ayat (1), DPR RI memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan yang diatur selengkapnya dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3)

Untuk mendukung pelaksanaan tugas DPR RI tersebut dan sesuai perubahan struktur dan ketatalaksanaan Setjen DPR RI sebagaimana diamanatkan oleh UU MD3 tersebut telah dilaksanakan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen dan BK DPR RI). Setjen dan BK DPR RI adalah aparatur pemerintah yang didalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan DPR RI.

Setjen DPR RI mempunyai tugas dan fungsi mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI dibidang administrasi dan persidangan, dan BK DPR RI mempunyai tugas dan fungsi mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI dibidang keahlian. Dalam pelaksanaan tugasnya, Setjen DPR RI dibantu Deputi Bidang Persidangan dan Deputi Bidang Administrasi. Deputi bidang Persidangan dibantu oleh biro-biro, salah satunya adalah Biro Kerja Sama Antar Parlemen (Biro KSAP).

Untuk mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik, telah dibentuk berbagai peraturan seperti Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Sekjen DPR RI No. 400 Tahun 2005 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Setjen DPR RI yang telah disempurnakan dengan Peraturan Sekjen No. 3 Tahun 2010 dan diperbaharui lagi dengan peraturan Sekjen Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, dimana Biro Kerja Sama Antar Parlemen berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Deputi Bidang Persidangan. Dari beberapa peraturan tersebut, dikemukakan bahwa setiap instansi

pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Tujuannya adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Kerja Sama Antar Parlemen tahun 2017 adalah bentuk akuntabilitas pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) tahun 2017 dan sebagai evaluasi untuk perbaikan kinerja Biro Kerja Sama Antar Parlemen di masa yang akan datang.

B. KELEMBAGAAN

1. KEDUDUKAN

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 400/Sekjen/2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekjen Nomor 3/PERSEKJEN/2010 dan diperbaharui lagi dengan Peraturan Sekjen Nomor 6 Tahun 2015, Biro Kerja Sama Antar Parlemen berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Persidangan.

2. TUGAS POKOK

Biro Kerja Sama Antar Parlemen mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan kesekretariatan kerjasama antar parlemen dan layanan alih bahasa.

3. FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatas, Biro Kerja Sama Antar Parlemen menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan evaluasi rencana strategis Biro Kerja Sama Antar Parlemen;
- b. Perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Biro Kerja Sama Antar Parlemen;
- c. Perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Biro Kerja Sama Antar Parlemen;
- d. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Biro Kerja Sama Antar Parlemen;
- e. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang persidangan Badan Kerja Sama Antar Parlemen;
- f. Pelaksanaan kebijakan di bidang persidangan Badan Kerja Sama Antar Parlemen;

- g. Penyelenggaraan persidangan kerjasama organisasi internasional dan dukungan analisis terhadap isu internasional;
- h. Penyelenggaraan persidangan kerjasama organisasi regional dan dukungan analisis terhadap isu regional;
- i. Penyelenggaraan persidangan kerjasama bilateral dan dukungan analisis terhadap isu bilateral;
- j. Penyelenggaraan dukungan administrasi dalam pelaksanaan kegiatan luar negeri Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- k. Penyelenggaraan dukungan alih bahasa;
- l. Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Deputi Bidang Persidangan;
- m. Penyusunan laporan kinerja Biro Kerja Sama Antar Parlemen; dan
- n. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Deputi Bidang Persidangan.

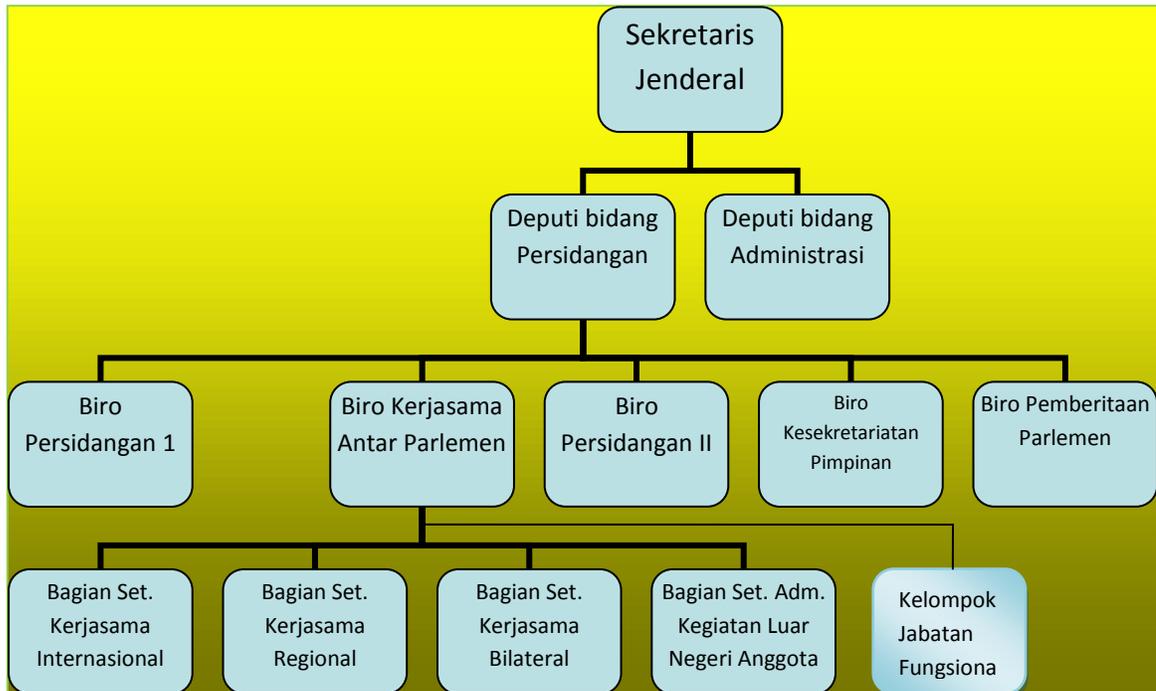
C. STRUKTUR ORGANISASI

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas, Biro Kerja Sama Antar Parlemen terdiri dari :

1. Bagian Sekretariat Kerjasama Organisasi Internasional (KSI).
2. Bagian Sekretariat Kerjasama Organisasi Regional (KSR);
3. Bagian Sekretariat Kerja Sama Bilateral (KSB);
4. Bagian Administrasi Kegiatan Luar Negeri Anggota (MINLUNA);
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

GAMBAR 1

STRUKTUR ORGANISASI BIRO KERJASAMA ANTAR PARLEMEN



Sumber : Struktur Organisasi Setjen dan BK DPR RI tahun 2017

D. SUMBER DAYA MANUSIA DI BIRO KERJASAMA ANTAR PARLEMEN

Aparatur Sipil Negara di lingkungan Biro Kerjasama Antar Parlemen berjumlah 38 orang, terdiri dari Kepala Biro dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di 4 unit kerja yaitu:

- 1) Bagian Administrasi Perjalanan Luar Negeri Anggota Dewan
- 2) Bagian Set. Kerjasama Bilateral
- 3) Bagian Set. Kerjasama Regional
- 4) Bagian Set. Kerjasama Internasional

Gambar 2

Grafik Data Aparatur Sipil Negara di Biro KSAP Tahun 2017



Sumber data : Bagian Kepegawaian Setjen DPR RI Tahun 2017

Disamping Pegawai Negeri Sipil, Biro Kerjasama Antar Parlemen juga didukung dengan 7 orang Tenaga Ahli yang memberikan dukungan dalam hal substansi dan keahlian kepada Anggota BKSAP.

Tabel 1

Data Aparatur Sipil Negara di Biro KSAP berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2017

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	SLTA (UMUM DAN KEJURUAN)	8 orang
2.	DIPLOMA (D3)	2 orang
3.	SARJANA (S1)	16 orang
4.	MAGISTER (S2)	12 orang
	JUMLAH	38 orang

Sumber : Bagian Kepegawaian Setjen DPR RI Tahun 2017

Gambar 3

Grafik Aparatur Sipil Negara di Biro KSAP berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2017



Sumber : Data Bagian Kepegawaian Setjen DPR RI Tahun 2017

E. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Melalui perencanaan organisasi, sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana, administrasi serta dukungan teknis lainnya, Biro Kerja Sama antar Parlemen mendukung dan memiliki tanggung jawab dalam keberhasilan misi diplomasi Parlemen yang dilaksanakan oleh DPR RI.

Misi diplomasi DPR tersebut tidak saja melalui dialog atas berbagai isu-isu internasional dalam kerangka organisasi yang merangkum kerjasama keparlemenan dan kerjasama bilateral tetapi juga melalui pengawasan terhadap berbagai negosiasi internasional dan pelaksanaan berbagai kesepakatan yang sudah diadopsi oleh pemerintah. Sehingga dalam pelaksanaannya, perjanjian-perjanjian internasional tersebut selalu mendahulukan kepentingan nasional, sejalan dengan norma dan hukum internasional dan menjunjung tinggi penegakan hukum di dalam negeri. Salah satu contohnya, dimana BKSAP DPR RI telah mengambil peran strategis adalah mengenai isu gerakan separatis Papua yang mendapatkan dukungan dari beberapa negara di kawasan Pasifik.

Mengingat negara-negara di kawasan Pasifik menganut sistem parlementer, peran DPR RI dalam kerangka *multi-track diplomacy* menjadi signifikan guna menyampaikan pandangan dan sikap pemerintah serta rakyat Indonesia yang tetap mengutamakan kedaulatan NKRI. Masalah kemerdekaan Palestina dan kontribusi terhadap krisis kemanusiaan warga Rohingya di Myanmar, juga menjadi fokus diplomasi BKSAP tahun 2017.

Berbagai keterlibatan DPR RI di kancah internasional tersebut dilayani oleh Biro Kerja Sama Antar Parlemen (KSAP) sebagai bagian dari Kesekretariatan Jenderal dan Badan Keahlian yang memberikan dukungan teknis dan keahlian kepada Dewan.

Saat ini Biro KSAP bukan saja memberikan dukungan kepada anggota BKSAP yang berjumlah 50 orang, namun juga kepada Pimpinan DPR dan seluruh anggota DPR RI yang berjumlah 560 orang melalui program Grup Kerjasama Bilateral (GKSB) dan kunjungan diplomasi parlemen perorangan. Bukan itu saja, Biro KSAP juga memberi dukungan kepada anggota parlemen sedunia yang menjadi anggota *Global Parliamentarians against Corruption (GOPAC)* mengingat saat ini Indonesia menjadi markas besar dari organisasi tersebut. Pada tahun 2017 dengan diselenggarakannya *World Parliamentary Forum on Sustainable Development* di Bali pada bulan September 2017 atas inisiatif Indonesia, Biro KSAP menjadi sekretariat dari sidang tersebut dimasa mendatang.

F. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan laporan pencapaian kinerja Biro KSAP selama tahun 2017. Capaian kinerja 2017 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja 2017 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis capaian kinerja terhadap rencana kerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

- Bab I** **PENDAHULUAN**
Menjelaskan secara ringkas latar belakang aspek strategis dan struktur organisasi.
- Bab II** **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DAN PENETAPAN KINERJA**
Menjelaskan Rencana Strategis Biro KSAP tahun 2015-2019 dan Penetapan Kinerja Tahun 2017.
- Bab III** **AKUNTABILITAS KINERJA**
Menjelaskan analisis pencapaian kinerja (mikro) Biro KSAP dikaitkan dengan pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2017.
- Bab IV** **PENUTUP**
Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari laporan akuntabilitas Kinerja Biro KSAP tahun 2017 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

Biro Kerja Sama Antar Parlemen pada tahun 2017, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan memperhitungkan potensi, peluang serta kendala yang mungkin timbul, telah menyusun Rencana Strategis tahun 2015 - 2019 yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program.

A. RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA TAHUNAN

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pemberian dukungan terhadap tiga fungsi DPR RI, program kerja Biro KSAP mengacu pada Rencana Strategis Deputi Bidang Persidangan dan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Tahun 2015 – 2019 sebagai dasar dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Biro dalam pencapaian visi, misi, serta tujuan yang ingin dicapai.

1. Visi

Rumusan visi dan misi Biro Kerja Sama Antar Parlemen mengacu pada visi dan misi Deputi Bidang Persidangan, dengan fokus pada tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, yaitu menyiapkan dan melaksanakan dukungan teknis dan administratif di bidang Persidangan dan Kerja Sama antar Parlemen, sehingga visi Biro KSAP adalah:

“TERWUJUDNYA DUKUNGAN KEGIATAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN YANG BERKUALITAS, PROFESIONAL DAN AKUNTABEL”

2. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Biro KSAP, yaitu:

- a. Mewujudkan analisis isu-isu bilateral, yang berkualitas dan akuntabel serta dukungan teknis dan administrasi yang cepat dan tepat, serta alih bahasa yang akurat.
- b. Mewujudkan analisis isu-isu regional yang berkualitas dan akuntabel serta dukungan teknis dan administrasi yang cepat dan tepat.

- c. Mewujudkan analisis isu-isu internasional yang berkualitas dan akuntabel serta dukungan teknis dan administrasi yang cepat dan tepat.
- d. Mengembangkan Database yang akurat dan informasi terbaru untuk mendukung kegiatan kerja sama antar parlemen.

3. Tujuan

- a. Meningkatkan hasil analisis isu-isu bilateral, regional dan internasional yang digunakan sebagai landasan pelaksanaan tugas dan fungsi BKSAP.
- b. Meningkatkan dukungan teknis, administrasi dan alih bahasa yang berkualitas dan tepat waktu.

Dengan mengacu pada tujuan tersebut, Biro KSAP dapat mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai, mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

4. Sasaran

- 1) Sasaran yang menggunakan anggaran satker setjen yaitu
“Tersedianya Dokumen Materi Kerjasama Antar Parlemen”

Dengan indikator-indikator sebagai berikut :

1. Jumlah Bahan Kebijakan Biro Kerjasama Antar Parlemen (KSAP)
2. Jumlah Materi Kerja Sama Organisasi Internasional
3. Jumlah Materi Kerja Sama Organisasi Regional
4. Jumlah Materi Kerja Sama Bilateral
5. Jumlah Materi Administrasi Kegiatan Luar Negeri Anggota

- 2) Sementara untuk sasaran yang menggunakan satker dewan adalah :

1. Layanan Sidang/Konferensi di dalam negeri.

Dengan indikator : jumlah penyelenggaraan konferensi/seminar regional/internasional

2. Layanan Pengembangan Hubungan Kerjasama Luar Negeri.

Dengan indikator : Jumlah keikutsertaan DPR RI di Organisasi Regional/Internasional dalam rangka diplomasi parlemen

3. Layanan Pelaksanaan Peran Diplomasi Anggota DPR RI.

Dengan indikator : Jumlah Anggota DPR RI yang melaksanakan peran diplomasi parlemen

B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017

Dengan telah diterbitkannya Inpres Nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara segera menindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Negara PAN Nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja. Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Tujuan khusus penetapan kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Biro KSAP telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2017 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2017. Perjanjian kinerja Biro KSAP disusun berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2017 yang telah ditetapkan. Substansi yang ada dalam Rencana Kinerja Tahunan maupun Perjanjian Kinerja adalah memuat sasaran-sasaran strategis Deputy Bidang Persidangan tahun 2015-2019. Berikut ini adalah Perjanjian Kinerja Biro KSAP tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 2
Perjanjian Kinerja Biro Kerjasama Antar Parlemen
Tahun 2017

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Satker Setjen			
1.	Tersedianya dokumen materi kerjasama antar parlemen	1. Jumlah Bahan Kebijakan Biro Kerja Sama Antar Parlemen	3 Dokumen
		2. Jumlah Materi Kerja Sama Organisasi Internasional	5 Dokumen
		3. Jumlah Materi Kerja Sama Organisasi Regional	5 Dokumen
		4. Jumlah Materi Kerja Sama Bilateral	5 Dokumen
		5. Jumlah Materi Administrasi Kegiatan Luar Negeri Anggota	5 Dokumen
Satker Dewan			
1.	Layanan Sidang/konferensi di dalam negeri	Jumlah Penyelenggaraan Konferensi/ Seminar Regional/ Internasional	3 kali
2.	Layanan Pengembangan Hubungan Kerjasama Luar Negeri	Jumlah keikutsertaan DPR di Organisasi Regional/Internasional dalam rangka diplomasi parlemen	16 kali
3.	Layanan Pelaksanaan Peran diplomasi Anggota DPR RI	Jumlah Anggota DPR RI yang melaksanakan peran diplomasi parlemen	220 Anggota

Perjanjian Kinerja Biro KSAP mengalami perubahan seiring dengan adanya penambahan Anggaran tahun 2017, terutama untuk Satker Dewan sehingga berubah menjadi sebagai berikut :

Tabel 3
Perjanjian Kinerja Biro Kerjasama Antar Parlemen (Perubahan)
Tahun 2017

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Satker Dewan			
1.	Layanan Sidang/konferensi di dalam negeri	Jumlah Penyelenggaraan Konferensi/ Seminar Regional/ Internasional	3 kali
2.	Layanan Pengembangan Hubungan Kerjasama Luar Negeri	Jumlah keikutsertaan DPR di Organisasi Regional/Internasional dalam rangka diplomasi parlemen	48 kali
3.	Layanan Pelaksanaan Peran diplomasi Anggota DPR RI	Jumlah Anggota DPR RI yang melaksanakan peran diplomasi parlemen	220 Anggota

Perbandingan Perjanjian Kinerja sebelum dan setelah perubahan

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Sblm	Target (setelah perubahan)
Satker Dewan				
1.	Layanan Sidang/konferensi di dalam negeri	Jumlah Penyelenggaraan Konferensi/ Seminar Regional/ Internasional	3 kali	3 kali
2.	Layanan Pengembangan Hubungan Kerjasama Luar Negeri	Jumlah keikutsertaan DPR di Organisasi Regional/Internasional dalam rangka diplomasi parlemen	16 kali	48 kali
3.	Layanan Pelaksanaan Peran diplomasi Anggota DPR RI	Jumlah Anggota DPR RI yang melaksanakan peran diplomasi parlemen	220 Anggota	220 Anggota

Setelah perubahan, target jumlah keikutsertaan DPR di Organisasi Regional/Internasional dalam rangka diplomasi parlemen semula 16 menjadi 48 kali atau bertambah 32 kali.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Selama tahun 2017 Biro Kerja Sama antar Parlemen (KSAP) telah melaksanakan kegiatan dukungan terhadap fungsi Diplomasi Parlemen yang dilaksanakan oleh DPR RI. Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan diarahkan berpedoman kepada Renstra Biro KSAP 2015 – 2019 .

Biro Kerjasama Antar Parlemen secara administrative menjadi PPK atas Anggaran Satker Setjen dan Satker Dewan. Untuk itu, LAKIP Biro KSAP tidak hanya menjelaskan mengenai capaian kinerja atas Satker Setjen, melainkan juga capaian kinerja dalam Satker Dewan. Dan sebagai perwujudan dari akuntabilitas kinerja dan alokasi anggaran yang disediakan, maka pengukuran kinerja ini menggambarkan pencapaian atas sasaran program/kegiatan yang didasarkan pada indikator kinerja yang targetnya sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017, dengan gambaran capaian adalah sebagai berikut :

Tabel 4

Capaian Kinerja Biro KSAP Tahun 2017

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Satker Setjen				
Tersedianya Dokumen Kerjasama Antar Parlemen	Jumlah Bahan Kebijakan Biro Kerjasama Antar Parlemen (KSAP)	3 Dokumen	3 dokumen	100 %
	Jumlah Materi Kerjasama Organisasi	5 dokumen	5 dokumen	100 %

	Internasional			
	Jumlah Materi Kerjasama Organisasi Regional	5 dokumen	5 dokumen	100 %
	Jumlah Materi Kerjasama Bilateral	5 dokumen	5 dokumen	100 %
	Jumlah Materi Administrasi Kegiatan Luar Negeri Anggota	5 dokumen	5 dokumen	100 %
Satker Dewan :				
Layanan Sidang/Konferensi di dalam negeri	Jumlah Penyelenggaraan Konferensi/ Seminar Regional/Internasional	3 kali	3 kali	100%
Layanan Pengembangan Hubungan Kerjasama Luar Negeri	Jumlah Keikutsertaan DPR di Organisasi Regional/Internasional dalam rangka diplomasi parlemen	48 kali	59 kali	123%
Layanan Pelaksanaan Peran Diplomasi Anggota DPR RI	Jumlah Anggota DPR RI yang melaksanakan peran diplomasi parlemen	220 Anggota	227 Anggota	103,2%

Dari table tersebut diatas terlihat bahwa pada tahun 2017 capaian kinerja Satker Setjen telah terealisasi sebesar 100% untuk semua indikator kerjanya. Adapun untuk Satker Dewan untuk indikator kinerja Layanan Sidang/Konferensi didalam negeri telah mencapai target 100%, sedangkan indikator kinerja Layanan Pengembangan Hubungan Kerjasama Luar Negeri telah mencapai 123%, dan untuk Layanan Pelaksanaan Peran Diplomasi Anggota DPR RI telah mencapai 103,2%.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka capaian kinerja untuk atker Setjen dan Satker Dewan dapat digambarkan dalam table berikut ini:

Tabel 5
Perbandingan Capaian Kinerja Biro KSAP Tahun 2016 dan 2017

	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2016			TAHUN 2017			KENAIKAN
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Satker Setjen :								
1	Jumlah Bahan Kebijakan Biro Kerjasama Antar Parlemen (KSAP)	4 Dok	3 dok	80 %	3 dok	3 dok	100%	20%
2	Jumlah Materi Kerjasama Organisasi Internasional	5 dok	5 dok	90%	5 dok	5 dok	90%	0%
3	Jumlah Materi Kerjasama Organisasi Regional	5 dok	5 dok	90%	5 dok	5 dok	100%	0%
4	Jumlah Materi Kerjasama Bilateral	5 dok	5 dok	90%	5 dok	5 dok	100%	0%
5	Jumlah Materi Administrasi Kegiatan Luar Negeri Anggota	5 dok	4 dok	80%	5 dok	5 dok	100%	10%
	Rata-rata capaian			86 %			100%	6%
Satker Dewan :								
1	Jumlah Penyelenggaraan Konferensi/ Seminar Regional/Internasional	3 kali	1 kali	33,3%	3 konf	3 konf	100%	66.7%

2	Jumlah Keikutsertaan DPR di Organisasi Regional/Internasional dalam rangka diplomasi parlemen	50 kali	61 kali	122%	48 kali	59 kali	123%	1%
3	Jumlah Anggota DPR RI yang melaksanakan peran diplomasi parlemen				220 Anggota	227 Anggota	103,2%	-
	Rata-rata capaian			77.65%			192.6%	115%

B. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja

Berdasarkan Pengukuran Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2017 maka dapat diuraikan sebagai berikut:

I. SATKER SEKRETARIAT JENDERAL

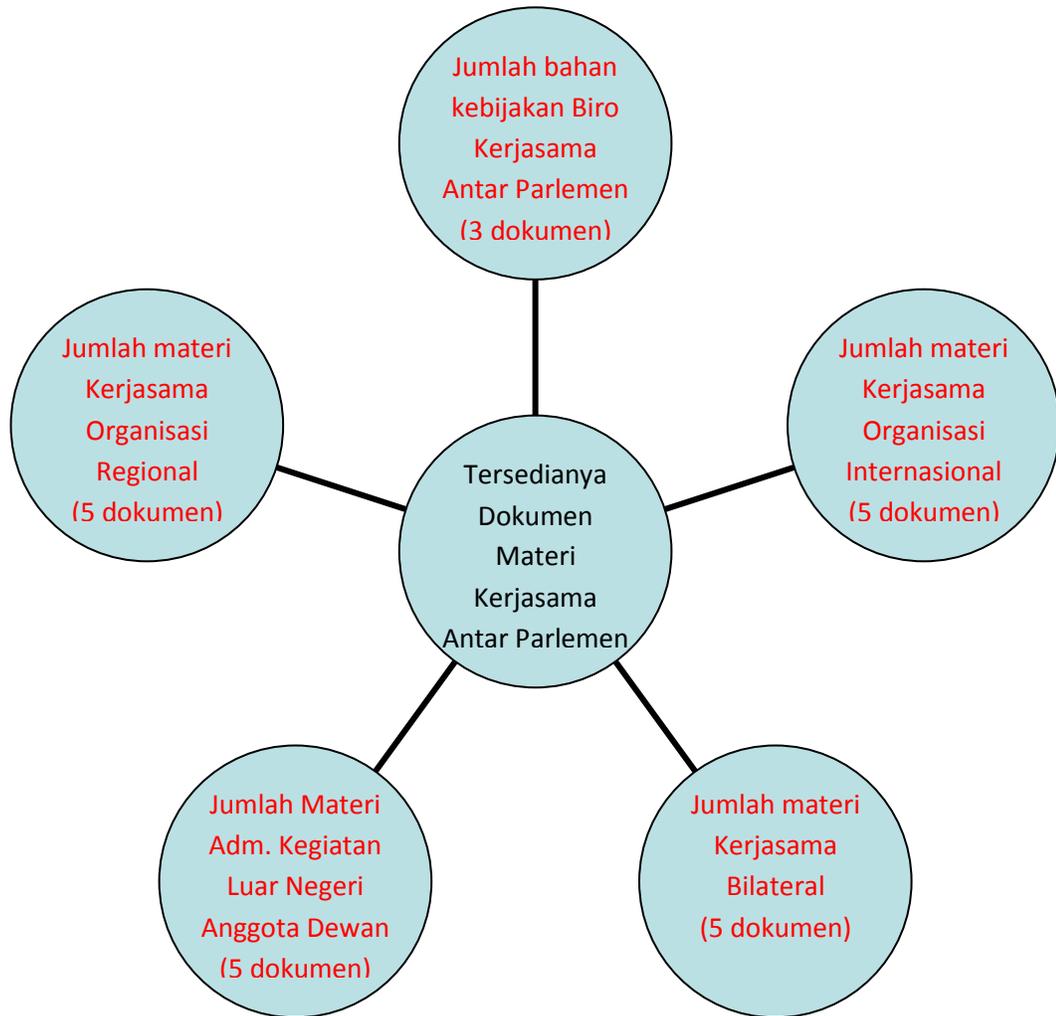
SASARAN

Tersedianya Dokumen Materi Kerjasama Antar Parlemen

Yang dimaksud dengan dokumen materi Kerjasama Antar Parlemen adalah dokumen-dokumen yang disiapkan oleh Biro KSAP dalam mendukung Kegiatan Kerjasama Antar parlemen yang dilakukan oleh DPR RI. Sasaran ini memiliki 5 indikator utama, yang digambarkan dalam gambar berikut ini :

Gambar 4

Indikator Kinerja Sasaran “Tersedianya Dokumen Materi Kerjasama Antar Parlemen”



Indikator 1		
Jumlah Bahan Kebijakan Biro Kerjasama Antar Parlemen		
Target	Realisasi	Capaian
3 dokumen	3 dokumen	100%

Bahan Kebijakan Biro KSAP pada tahun 2017 ditargetkan 3 dokumen, yang terdiri dari dokumen Rencana Kerja dan Anggaran, dokumen LAKIP Biro KSAP dan Dokumen

Kebijakan Biro KSAP. Pada akhir tahun 2017, 3 dokumen tersebut telah direalisasikan, sehingga capaian target sebesar 100%.

Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2016 yang sebesar 80 %, maka pada tahun 2017 terjadi peningkatan capaian sebesar 20% pada indikator kinerja pertama Biro Kerjasama Antar Parlemen.

Dalam menyelesaikan ketiga dokumen tersebut, tidak sepenuhnya menggunakan Anggaran yang tersedia. Terjadi efisiensi dalam kegiatan perumusan bahan kebijakan Biro KSAP. Misalnya dalam hal kegiatan paket meeting dalam dan luar kota.

Indikator 2		
Jumlah Materi Kerjasama Organisasi Internasional		
Target	Realisasi	Capaian
5 dokumen	5 dokumen	100%

Jumlah Materi Kerjasama Organisasi Internasional dari 5 dokumen yang ditargetkan, terealisasi sebanyak 5 dokumen yang terdiri dari laporan kegiatan per masa persidangan, dengan nilai capaian adalah 100 %.

Yang dimaksud dengan 5 dokumen dalam hal ini yaitu pada tahun 2017 memiliki 5 Masa Sidang, maka output yang ditargetkan setiap masa sidang adalah 1 dokumen, sehingga target dalam 1 tahun adalah 5 dokumen. 1 dokumen tersebut berupa dokumen diplomasi parlemen dalam menghadiri Sidang-Sidang Internasional, antara lain penyiapan itinerary delegasi, agenda delegasi, draft SK Pimpinan, intervensi delegasi, buku *country profile*, buku saku delegasi, press release Sidang, Konsep Draf Resolusi, Konsep pidato, dan draft Laporan Delegasi.

Setiap dokumen terdiri dari berbagai bahan/materi yang telah disiapkan oleh Sekretariat Kerjasama Internasional dalam mendukung berbagai kegiatan dalam masa sidang tersebut, dimana jumlah 1 dokumen berbeda-beda dalam setiap masa sidang, tergantung banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, baik kegiatan rapat-rapat, penyiapan materi delegasi sidang, laporan dan sebagainya.

Jika dibandingkan dengan tahun 2016, maka capaian pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 10% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Besaran capaian antara tahun 2016 dan 2017 juga sama, walaupun dalam hal kuantitas, tahun 2017 ini jumlah kegiatan yang dilakukan lebih banyak dari tahun sebelumnya dalam hal pengiriman delegasi, karena pada tahun 2016 Bag. KSI mengirimkan sebanyak 27 Delegasi, dan tahun 2017 mengirimkan sebanyak 31 Delegasi menghadiri Konferensi Internasional.

Belum sejalannya penggunaan anggaran Satker Setjen dengan Satker Dewan dalam kegiatan Kerjasama Organisasi Internasional disebabkan antara lain karena terbatasnya waktu yang tersedia, sehingga rapat-rapat persiapan dan rapat koordinasi dengan mitra terkait dalam rangka persiapan bahan/materi sidang belum dapat terlaksana secara maksimal. Selain itu Kegiatan meeting dalam kota pun tidak dapat terlaksana dengan maksimal dikarenakan terbatasnya jumlah SDM yang tersedia.

Indikator 3		
Jumlah Materi Kerjasama Organisasi Regional		
Target	Realisasi	Capaian
5 dokumen	5 dokumen	100%

Jumlah Materi Kerjasama Organisasi Regional dari 5 dokumen yang ditargetkan, terealisasi sebanyak 5 dokumen yang terdiri dari laporan kegiatan per masa persidangan, dengan nilai capaian adalah 100%.

Sama seperti sebelumnya, 5 dokumen yang dimaksud adalah sesuai dengan jumlah masa sidang yang ada dalam satu tahun. Setiap dokumen berbeda-beda jumlahnya tergantung banyaknya pengiriman delegasi regional dalam setiap masa sidang.

Jika dibandingkan dengan tahun 2016, maka capaian pada tahun 2017 sama dengan tahun 2016 yaitu 90% walaupun dalam hal kuantitas, tahun 2017 ini jumlah kegiatan yang dilakukan lebih sedikit dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 Biro KSAP menghasilkan output dalam rangka mendukung kegiatan pengiriman Delegasi ke sidang Regional sebanyak 13 kali, sedangkan tahun 2017 jumlah kegiatan adalah 12 kali.

Indikator 4

Jumlah Materi Kerjasama Bilateral

Target	Realisasi	Capaian
5 dokumen	5 dokumen	100%

Jumlah Materi Kerjasama Bilateral dari 5 dokumen yang ditargetkan, terealisasi sebanyak 5 dokumen yang terdiri dari laporan kegiatan per masa persidangan, dengan nilai capaian adalah 100%.

Jika dibandingkan dengan tahun 2016, maka capaian pada tahun 2017 lebih baik dari sisi hasil capaian yaitu 100%, walaupun dalam hal jumlah kegiatan yang dilakukan lebih sedikit dari tahun sebelumnya, yaitu dukungan terhadap 14 pengiriman delegasi GKSB (tahun 2017) dibandingkan 18 GKSB (tahun 2016).

Sementara untuk dukungan kegiatan kunjungan teknis BKSAP adalah sama yaitu 3 delegasi pada tahun 2017 dan tahun 2016.

Selain penyiapan bahan-bahan untuk kunjungan delegasi GKSB maupun teknis, Bagian Set. Kerjasama Bilateral juga melakukan kegiatan koordinasi melalui pembuatan surat-surat maupun berita faximile untuk penjajakan kunjungan ke luar negeri oleh Alat Kelengkapan Dewan lainnya seperti Pimpinan DPR, Komisi – Komisi, Badan – Badan maupun Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian.

Bagian Set. Kerjasama Bilateral juga memberikan dukungan atas penerimaan tamu – tamu dari Parlemen Negara sahabat maupun kunjungan Courtesy Call Duta Besar negara sahabat.

Indikator 5

Jumlah Materi Administrasi Kegiatan Luar Negeri Anggota Dewan

Target	Realisasi	Capaian
5 dokumen	5 dokumen	100%

Jumlah Materi Administrasi Kegiatan Luar Negeri Anggota dari 5 dokumen yang ditargetkan, terealisasi sebanyak 5 dokumen yang terdiri dari 5 laporan kegiatan per masa persidangan, sehingga capaian adalah 100%.

Jika dibandingkan dengan tahun 2016, maka capaian pada tahun 2017 adalah lebih tinggi dengan tahun 2016 yaitu 100% dibandingkan pada tahun 2016 yang hanya 80%.

Pada tahun 2016, Bagian Administrasi Kegiatan Luar Negeri Anggota merupakan bagian yang baru terbentuk dan baru melaksanakan kegiatan diplomasi anggota DPR RI secara perorangan. Masih diperlukan banyak sosialisasi, baik kepada Anggota DPR maupun kepada Kedutaan-kedutaan Republik Indonesia di berbagai kawasan. Setidaknya terdapat 21 pengiriman delegasi kunjungan individu dan 7 kali sosialisasi.

Pada tahun 2017, tidak ada lagi kegiatan sosialisasi. Dan pengiriman delegasi sudah melampaui target yang ditetapkan.

Selain melakukan dukungan untuk kegiatan pengiriman delegasi kunjungan individu, Bagian Administrasi Kegiatan Luar Negeri Anggota juga melakukan dukungan kegiatan penerjemahan. Kegiatan penerjemahan ini dilakukan berdasarkan permintaan, baik penerjemahan lisan maupun penerjemahan tertulis. Permintaan penerjemahan datang dari seluruh Alat Kelengkapan Dewan dan juga dari Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

II. SATKER DEWAN

SASARAN 1

Layanan Sidang/Konferensi di dalam negeri

Indikator 1.1.

Jumlah Penyelenggaraan Konferensi/Seminar Regional/Internasional

Target	Realisasi	Capaian
3 Konferensi	3 Konferensi	100%

Tiga Konferensi yang terselenggara pada tahun 2017 yaitu :

1. Penyelenggaraan Sidang ke-9 *ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) Caucus* pada tanggal 17 – 20 Juli 2017 di Fairmont Jakarta. Sidang *AIPA Caucus* tahun ini mengambil tema **“Strengthening Maritime Cooperation and Peaceful Resolution to Conflicts in ASEAN”**
2. *World Parliamentary Forum on Sustainable Development* untuk pertama kalinya pada tanggal 6-7 September 2017 di Nusa Dua – Bali. Konferensi tersebut menghasilkan *Bali Declaration* dengan tema *Achieving the 2030 Agenda Through Inclusive Development* yang menekankan pada topik *“Leaving No One Behind”*, *“Ending Violence and Sustaining Peace”*, *“Enhancing Climate Actions”* dan langkah-langkah tindak lanjut yang diharapkan untuk diterapkan di masa mendatang.
3. Pertemuan *GOPAC Annual Board Meeting* pada tanggal 8 September 2017 di Nusa Dua -Bali untuk membahas kelanjutan organisasi *Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC)* ke depan. DPRRI selaku Ketua GOPAC periode 2015-2017 dikukuhkan kembali sebagai jabatannya hingga tahun 2019.

Dalam penyelenggaraan Konferensi Regional/Internasional di dalam Negeri, Biro Kerjasama Antar Parlemen memberikan dukungan berupa penyiapan bahan-bahan materi persidangan, baik berupa sambutan-sambutan, point-point pembicaraan, skenario sidang, administrasi untuk penentuan tempat sidang dan seluruh proses penyelenggaraan sidang dan juga dokumen-dokumen yang dihasilkan dalam sidang tersebut.

Selain itu, Biro KSAP juga memberikan dukungan dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seminar/workshop di dalam negeri lainnya sebagai berikut:

- Peringatan *International Women’s Day* pada tanggal 21 Maret 2017 dengan tema *“Women in the changing world of work: Planet 50:50 by 2030”* di Ruang Pustakaloka DPR RI, yang memfokuskan pembahasan pada peran wanita di dalam dunia kerja dan diskusi untuk mendalami berbagai cara untuk mencapai kesetaraan gender di dalam lingkungan kerja yang saat ini berubah seiring dengan dinamika yang dibawa oleh pekerja perempuan dan perubahan globalisasi, revolusi teknologi, kebijakan perdagangan baru dan juga dampak dari perubahan iklim. Hal ini tentu membutuhkan kebijakan baru yang inovatif yang meningkatkan status pekerjaan informal, akses perempuan terhadap akses teknologi dan juga pekerjaan layak yang dapat melindungi perempuan dari perubahan iklim dan kekerasan di tempat kerja.

- *Embassy Briefings on World Parliamentary Forum on Sustainable Development* pada tanggal 13 Juli 2017 di Hall Nusantara Gedung DPRRI dalam rangka sosialisasi penyelenggaraan konferensi *World Parliamentary Forum on Sustainable Development* yang diselenggarakan pada tanggal 6-7 September 2017 di Nusa Dua – Bali. Pertemuan ini ditujukan untuk memberikan informasi yang lengkap tentang konferensi tersebut dan diharapkan dapat meningkatkan animo negara-negara yang diundang untuk mengirimkan banyak delegasi dalam konferensi dimaksud.
- Penyelenggaraan *Forum Group Discussion Sidang World Parliamentary Forum on Sustainable Development* pada tanggal 28 Agustus 2017 di Gedung DPR RI yang dihadiri oleh sejumlah Kementerian/Lembaga terkait guna menerima masukan-masukan dari *stakeholder* terkait pelaksanaan *World Parliamentary Forum* pada 6-7 September 2017 yang akan dihadiri 45 negara dari seluruh benua dan menjadi momentum penting dan bersejarah bagi Indonesia, khususnya DPR RI. Karena sejak dideklarasikan komitmen bersama tujuan pembangunan berkelanjutan, atas inisiasi DPR, ini akan menjadi kali pertama ajang berkumpulnya seluruh delegasi untuk membahas progres agenda 2030 tersebut.
- Kunjungan Kerja BKSAP dalam rangka “BKSAP Day” yaitu kegiatan BKSAP untuk mensosialisasikan dan melakukan diseminasi informasi kepada masyarakat luas khususnya kaum muda tentang BKSAP dan kinerja BKSAP yang telah tercapai maupun rencana kedepan. Program BKSAP Day ditujukan untuk mendorong mahasiswa/kaum muda lebih sadar politik, tidak ragu menggeluti dunia politik dan bersedia terjun ke dunia politik tanpa ragu, misalnya berani menggunakan hak suaranya pada pemilihan umum.
- Kegiatan ini telah berlangsung sebanyak 4 (empat) kali yakni di Universitas Islam Blitar tanggal 23 - 25 Maret 2017 dan Universitas Lambung Mangkurat - Kalimantan Selatan tanggal 9 - 11 April 2017, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Sunan Giri Trenggalek – Jawa Timur tanggal 22-24 Agustus 2017, dan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darussalam Martapura tanggal 18-20 September 2017.

Apabila dibandingkan dengan pencapaian target pada tahun 2016, capaian pada tahun 2017 ini untuk sasaran 1 ini lebih baik. Karena pada tahun 2016 hanya tercapai 33,3%, sementara untuk tahun 2017 tercapai 100%.

Pada tahun 2016, dari 3 konferensi yang direncanakan hanya terealisasi 1 konferensi, sementara untuk tahun 2017 dari 3 konferensi yang direncanakan semuanya terrealisasi.

SASARAN 2

Layanan Pengembangan Hubungan Kerjasama Luar Negeri

Indikator 2.1.

Jumlah Keikutsertaan DPR di Sidang Organisasi Regional/Internasional

Target	Realisasi	Capaian
48 kali	59 kali	123%

Pada awal tahun targetnya adalah 16 kali, namun setelah adanya penambahan anggaran APBN-P, target dalam Perjanjian Kinerja berubah menjadi 48 kali.

Jumlah Keikutsertaan DPR di Organisasi Regional/Internasional dalam rangka diplomasi parlemen dari target sebanyak 48 kali, sampai dengan akhir tahun 2017 telah terlaksana melebihi targetnya yaitu 59 kali, dengan demikian capaiannya adalah sebesar 123%

Pada tahun 2017 ini, Biro Kerjasama Antar Parlemen telah mendukung tercapainya efisiensi dalam pengiriman Delegasi DPR RI di Organisasi Regional dan Internasional yaitu yang semula ditargetkan 16 kali, kemudian bertambah menjadi 48 kali namun telah terealisasi sebanyak 59 kali kunjungan. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang menargetkan 50 kegiatan dan terealisasi sebanyak 61 kegiatan dengan capaian 122%, maka tahun 2017 ini mengalami peningkatan sebesar 1%.

Didalam mendukung kegiatan Dewan dalam menghadiri Sidang-Sidang Internasional, Biro Kerjasama Antar Parlemen memberikan dukungan teknis, administrative dan substansi kepada Dewan dan menghasilkan *output* berupa itinerary Delegasi, Agenda Delegasi, Draft Resolusi, Draft SK Pimpinan, intervensi delegasi, Buku Posisi Delegasi, Leaflet delegasi, Administrasi Perjalanan, Buku saku delegasi, rilis hasil sidang ke medsos/medcet, dan draft laporan delegasi.

Layanan Pengembangan Hubungan Kerjasama Luar Negeri dalam kegiatan bilateral

Berikut ini adalah data output layanan Pengembangan hubungan Kerjasama Luar Negeri dalam kegiatan menghadiri sidang-sidang internasional :

Tabel 6
Data Output Dukungan dalam Sidang-sidang Internasional Tahun 2017

OUTPUT	MASA	MASA	MASA	MASA	MASA
	SIDANG III	SIDANG IV	SIDANG V	SIDANG I	SIDANG II
Itinerary Delegasi	5 item	5 item	4 item	7 item	8 item
Agenda Delegasi	5 item	5 item	4 item	7 item	8 item
Draft Intervensi Delegasi	5 berkas	5 berkas	4 berkas	7 berkas	8 berkas
Draft Pimpinan	SK 5 draft	5 draft	4 draft	7 draft	8 draft
Draft resolusi	5 draft	5 draft	4 draft	7 draft	8 draft
Buku Posisi Delegasi	5 buku	5 buku	4 buku	7 buku	8 buku
Leaflet Delegasi	250 lbr	250 lbr	200 lbr	350 lbr	400 lbr
Buku Saku Delegasi	5 buku	5 buku	4 buku	7 buku	8 buku
Draft Press release Sidang	5 item	5 item	4 item	7 item	8 item
Draft Laporan Delegasi	5 buku	4 buku	4 buku	7 buku	8 buku
Administrasi perjalanan	5 berkas	5 berkas	4 berkas	7 berkas	8 berkas
Jumlah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen

Jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang memiliki kegiatan pengiriman delegasi sebanyak 27 kali, maka tahun 2017 terjadi menjadi 29 kali/kegiatan pengiriman delegasi. Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi Biro Kerjasama Antar Parlemen

dalam mempersiapkan dukungan dan output yang optimal kepada Pimpinan dan Anggota Dewan. Dalam hal ini juga terdapat kendala dalam hal sumber daya manusia yang tersedia di Biro KSAP yang terbatas baik kuantitas maupun kualitasnya sehingga perlu ada upaya perbaikan yang dilakukan oleh Setjen DPR RI dalam hal ini unit kerja yang terkait dengan SDM guna mengatasi kendala tersebut. Karena kedepannya Biro KSAP ingin semakin meningkatkan kualitas dukungannya kepada Dewan dan memutakhirkan basis data dan penggunaan teknologi didalam memberikan dukungan teknis, administrative maupun substansi kepada Anggota Dewan guna mencapai diplomasi parlemen yang lebih optimal.

Layanan Pengembangan Hubungan Kerjasama Luar Negeri dalam kegiatan Regional

Selain dukungan dalam kegiatan pengiriman delegasi ke Sidang-sidang Internasional, Biro KSAP juga memberi dukungan dalam kegiatan pengiriman delegasi ke Sidang-sidang regional.

Kegiatan Kerjasama regional Biro Kerjasama Antar Parlemen juga telah mencapai output 5 dokumen selama tahun 2017 dalam mendukung 13 kegiatan pengiriman Delegasi pada Sidang-sidang regional dengan rincian capaian output sebagai berikut:

Tabel 7

Data Output Dukungan Kegiatan Biro KSAP dalam Sidang-sidang Regional Tahun 2017

OUTPUT	MASA SIDANG III	MASA SIDANG IV	MASA SIDANG V	MASA SIDANG I	MASA SIDANG II
Itinerary Delegasi	2 item	2 item	3 item	4 item	2 item
Agenda Delegasi	2 item	2 item	3 item	4 item	2 item
Draft Intervensi Delegasi	2 berkas	2 berkas	3 berkas	4 berkas	2 berkas
Draft SK Pimpinan	2 draft	2 draft	3 draft	4 draft	2 draft
Draft	2 draft	2 draft	3 draft	4 draft	2 draft

resolusi					
Buku Posisi Delegasi	2 buku	2 buku	3 buku	4 buku	2 buku
Leaflet Delegasi	100 lbr	100 lbr	150 lbr	200 lbr	100 lbr
Buku Saku Delegasi	2 buku	2 buku	3 buku	4 buku	2 buku
Press release Sidang	2 item	2item	3 item	4 item	2 item
Draft Laporan Delegasi	2 buku	2 buku	3 buku	4 buku	2 buku
Administrasi perjalanan	2 berkas	2 berkas	3 berkas	4 berkas	2 berkas
Jumlah	1 dokumen				

Jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang memiliki kegiatan pengiriman Delegasi kesidang Regional sebanyak 13 kegiatan, tahun 2017 jumlah kegiatan mengalami adalah sama yaitu sebanyak 13 Kegiatan.

Di lingkup kerjasama regional dan internasional, Biro KSAP juga menjaga kontinuitas keanggotaan Indonesia di beberapa organisasi internasional yang Indonesia secara rutin membayar kontribusi tahunan seperti IPU, AIPA, PUIC, ASGP dan keanggotaan Indonesia organisasi lainnya baik organisasi parlemen maupun non parlemen seperti APA, APPF, OECD, WIP dan ERIA. Disamping itu, Indonesia pada tahun 2017 masih menjadi anggota tetap diantaranya Ketua Global Parliamentarians against Corruption (GOPAC), Ketua Komisi International Humanitarian Laws IPU, Anggota tetap di Komisi UN Affairs IPU, *Board Member di Komite Young Parliamentarians IPU*, dan anggota tetap di komisi Middle East Questions IPU. Selain itu Biro KSAP juga menjadi sekretariat GOPAC dunia dan juga national chapter dari GOPAC Indonesia.

Layanan Pengembangan Hubungan Kerjasama Luar Negeri dalam kegiatan bilateral

Biro Kerjasama Antar Parlemen memberikan dukungan teknis, administrasi dan substansi kepada Dewan dalam melakukan Kunjungan Teknis BKSAP ke 3 negara dan Kunjungan GKS ke 14

negara pada tahun 2017. Bila dibandingkan dengan tahun 2016, dimana Biro KSAP memberikan dukungan atas kunjungan GKS ke 18 negara, maka ada penurunan jumlah pengiriman delegasi GKS sebanyak 4 negara untuk tahun 2017.

Dari kunjungan teknis dan GKS tersebut telah dicapai berbagai kesamaan pendapat terkait dengan peningkatan hubungan diantara DPR RI dengan parlemen negara sahabat, baik dalam hal saling dukung dalam keanggotaan organisasi internasional, saling kunjung diantara parlemen, serta beberapa penandatanganan MoU antar parlemen. Dari berbagai kunjungan tersebut, juga dibahas dan disepakati untuk peningkatan kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya dan sama-sama memberikan dukungan kepada pemerintah masing-masing untuk terus mendukung upaya kerjasama yang baik diantara kedua negara serta melakukan langkah-langkah konkret untuk mendukung peningkatan investasi di Indonesia maupun di di negara-negara sahabat.

Tabel 8

Data Output Dukungan Kegiatan Biro KSAP dalam Kerjasama Bilateral Tahun 2017

OUTPUT	MASA SIDANG III	MASA SIDANG IV	MASA SIDANG V	MASA SIDANG I	MASA SIDANG II
TOR Kunjungan	2 draft	1 draft	3 draft	6 draft	5 draft
Dok. Penjajakan	2 berkas	1 berkas	3 berkas	6 berkas	5 berkas
Itinerary Delegasi	2 item	2 item	7 item	2 item	1 item
Agenda Delegasi	2 item	2 item	7 item	2 item	1 item
Leaflet Delegasi	60 lembar	30 lembar	90 lembar	180 lembar	150 lembar
Draft SK Pimpinan	2 draft	2 draft	7 draft	2 draft	1 draft
Buku Saku Delegasi	2 buku	2 buku	7 buku	2 buku	1 buku
Press release Kegiatan	2 item	2 item	7 item	2 item	1 item
Draft Laporan Delegasi	2 buku	2 buku	7 buku	2 buku	1 buku
Administrasi perjalanan	2 berkas	2 berkas	7 berkas	2 berkas	1 berkas
Jumlah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen

Rapat-Rapat Bksap Serta Penerimaan Tamu (*Friendly Talk*) Delegasi Parlemen Negara Sahabat Dan *Courtesy Call* Dengan Duta Besar Negara Sahabat

Selain melakukan dukungan dalam kegiatan tersebut, dalam rangka meningkatkan diplomasi parlemen dalam kerjasama bilateral, Biro KSAP juga melakukan dukungan terhadap kegiatan Rapat-rapat BKSAP, Rapat-rapat GKSB maupun penerimaan tamu (*friendly talk*) dengan parlemen negara sahabat serta *courtesy call* dengan Duta Besar negara sahabat.

Tabel 9
Data Output Dukungan Kegiatan Biro KSAP dalam Kegiatan Rapat-rapat, *Courtesy call* dan *Friendly talk* BKSAP DPR RI Tahun 2017

OUTPUT	MASA SIDANG III	MASA SIDANG IV	MASA SIDANG V	MASA SIDANG I	MASA SIDANG II
Draft Pointers	11 draft	11 draft	17 draft	21 draft	4 draft
Draft Laporan Singkat	11 draft	11 draft	17 draft	21 draft	4 draft
Jumlah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen

SASARAN 3

Layanan Pelaksanaan Peran Diplomasi Anggota DPR RI

Indikator 3.1.

Jumlah Anggota DPR RI yang melaksanakan peran diplomasi parlemen

Target	Realisasi	Capaian
220 Anggota	227 Anggota	102,3%

Dalam pelaksanaan peran diplomasi Anggota DPR RI, terdapat dukungan administrasi Kunjungan Individu Anggota dan Pelaksanaan kegiatan alih bahasa/penerjemahan. Selama tahun 2017, telah pelaksanaan peran diplomasi Anggota DPR RI sebanyak 227 Anggota Dewan ke 54 negara (dengan rincian terlampir).

Adapun capaian dukungan layanan untuk kedua kegiatan tersebut sebagai berikut:

a. Dukungan Administrasi Kunjungan Individu Anggota

Tabel 10

Data Output Dukungan Kegiatan Biro KSAP dalam Diplomasi Individu DPR RI Tahun 2017

OUTPUT	MASA SIDANG III	MASA SIDANG IV	MASA SIDANG V	MASA SIDANG I	MASA SIDANG II
Itinerary Delegasi	6 item	13 item	11 item	15 item	9 item
Agenda Delegasi	0 item	1 item	3 item	6 item	8 item
Draft Pimpinan	SK 0 draft	1 draft	3 draft	6 draft	8 draft
Dokumen Penjajakan	0 draft	1 draft	3 draft	6 draft	8 draft
Administrasi perjalanan	0 berkas	1 berkas	3 berkas	6 berkas	8 berkas
Jumlah	0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen

b. Pelaksanaan Kegiatan Alih Bahasa/Penerjemahan

Biro KSAP juga melakukan dukungan kegiatan dalam penerjemahan tertulis dan lisan untuk Pimpinan DPR, BKSAP dan Alat Kelengkapan Dewan lainnya dengan output kegiatan selama tahun 2016 sebagai berikut :

1) Kegiatan Penerjemahan Tertulis

Tabel 11

Data Penerjemahan Tertulis Tahun 2017

No	Jenis teks	Jumlah teks	Keterangan
1	Terjemahan tertulis Bahasa Inggris Dokumen bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia dan sebaliknya seperti : buku,	229 dokumen	Dari masing-masing dokumen dan surat bervariasi jumlah halamannya, mulai dari 1 lembar sampai puluhan halaman, bahkan ratusan

	pidato, Laporan, surat-surat dari negara lain, surat Indonesia-Inggris, MoU, <i>Agreed Minutes of Meeting, Joint Statement, Term of References</i> , terjemahan produk hukum, terjemahan ilmiah, terjemahan presentasi dan CV Indonesia-Inggris		halaman. Untuk yang sudah ratusan halaman dilakukan <i>outsourcing</i> , Penerjemah Muda melakukan <i>editing</i> dari penerjemah <i>outsourced</i>
2	Terjemahan tertulis Bahasa Spanyol	3 dokumen	
3	Terjemahan tertulis Bahasa Perancis	3 dokumen	
4	Terjemahan tertulis Bahasa Arab	3 dokumen	

2) Kegiatan Penerjemahan Lisan

Tabel 12

Data Penerjemahan Lisan Tahun 2017

No.	Jenis	Jumlah acara/hari
Terjemahan lisan teknik konsekutif dan simultan dalam menerima tamu-tamu asing sbb:		
1	Penerjemahan lisan berbahasa Arab	14 kali
2	Penerjemahan lisan berbahasa Inggris	55 kali
3	Penerjemahan lisan berbahasa Spanyol	3 kali

Secara keseluruhan, pada tahun 2016 rata-rata capaian untuk Satker Setjen adalah sebesar 86% sementara untuk satker dewan sebesar 77.65%.

Sedangkan pada tahun 2017 rata-rata capaian untuk satker Setjen sebesar 92% dan untuk Satker Dewan memiliki nilai capaian rata-rata 192,6%

Dengan demikian, jika dibandingkan dengan tahun 2016 terdapat peningkatan capaian untuk Satker Setjen sebesar 6% dan peningkatan capaian untuk Satker Dewan sebesar 115%

C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Biro KSAP ditunjang dengan anggaran yang berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2017. Dari DIPA tersebut digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Biro KSAP melalui kegiatan-kegiatan sebagaimana tercantum dalam Rencana Kinerja. Selanjutnya, kembali lagi ke tugas pokok dan fungsi Sekretariat Jenderal DPR RI yaitu sebagai Sekretariat yang memberikan dukungan terhadap tiga fungsi Dewan, maka penggunaan anggaran juga tidak bisa dilepaskan dari kebijakan DPRRI.

Ada dua satker yang dikelola oleh Biro Kerjasama Antar Parlemen, yaitu Satker Dewan dan Satker Sekretariat Jenderal.

Anggaran Tahun 2017

- ❖ Pada tahun 2016, BKSAP telah mengajukan Usulan Anggaran untuk Tahun 2017 sebesar Rp. 190.567.664.400,- (*Seratus Sembilan Puluh Milyar Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah*), akan tetapi dalam **DIPA Tahun 2017** yang disetujui hanya sebesar **Rp. 112.359.523.000,-** (*Seratus Dua Belas Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah*), atau mengalami penurunan ± 41 %.
- ❖ Penurunan Pagu Anggaran tersebut sebagian besar justru dari jumlah pengiriman Delegasi BKSAP ke Luar Negeri dan Kunjungan Individu Anggota DPR RI yang pada Tahun 2016 penyerapannya sangat tinggi. Berikut persandingan usulan Anggaran BKSAP dengan DIPA Tahun 2017 dalam Program Layanan Pengembangan Hubungan Kerjasama Luar Negeri:

Tabel 13

Data Persandingan Usulan ANggaran BKSAP dengan DIPA BKSAP Tahun 2017

No	Kegiatan	Usulan BKSAP		DIPA Tahun 2017		Persentase Penurunan
		Rp.	Jumlah	Rp.	Jumlah	
1	Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama Internasional	26.257.287.000	21 kali	7.219.445.000	5 kali	± 72,50 %
2	Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama Regional	12.634.843.000	18 kali	3.816.825.000	5 kali	± 69,79 %
3	Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama Bilateral	46.256.545.000	22 kali	11.516.930.000	5 kali	± 75,10 %
4	Kunjungan Individu Anggota DPR RI	43.266.288.000	115 org	34.144.087.000	220 org	± 21,08 %
	Jumlah	128.414.963.000		56.697.287.000		

- ❖ Dengan adanya penurunan Pagu Anggaran dimaksud, BKSAP menyampaikan usulan penambahan anggaran prioritas APBN-P Tahun 2017 sebesar **Rp. 71.717.676.000,-** (*Tujuh Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah*) yang akan dipergunakan untuk Pelaksanaan Kegiatan-kegiatan Internasional, Regional, dan Bilateral, serta Kegiatan Kunjungan Individu Luar Negeri Anggota DPR RI guna meningkatkan peran Diplomasi Parlemen DPR RI di dunia Internasional.
- ❖ Usulan penambahan Anggran tersebut akhirnya disetujui sehingga jumlah Anggaran untuk tahun 2017 menjadi sebesar **Rp. 185.496.767.000** (*Seratus Delapan Puluh Lima Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah*)
- ❖ Dengan berubahnya pagu Anggaran tersebut, maka Penetapan Kinerja di Biro KSAP juga mengalami perubahan dalam salah satu target yaitu dalam Sasaran Program/Kegiatan : Layanan Pengembangan Hubungan Kerjasama Luar Negeri dengan

indikator Kinerja : Jumlah keikutsertaan DPR di Organisasi Regional / Internasional dalam rangka diplomasi parlemen, semula 16 kali menjadi 48 kali.

Tabel 14
Perbandingan jumlah anggaran sebelum dan setelah APBN-P

Jumlah Anggaran		Jumlah Penambahan
Sebelum	Setelah	
Rp. 112.359.523.000	Rp. 185.496.767.000	Rp. 73.137.244.000

Pagu Anggaran BKSAP Tahun 2017 setelah mendapatkan tambahan APBN-P adalah sebesar **Rp. 185.496.767.000** (*Seratus Delapan Puluh Lima Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah*), nilai realisasi dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2017 adalah sebesar **Rp. 134.162.509.672** (*Seratus Tiga Puluh Empat Milyar Seratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*) atau sebesar **72,33 %** (*Tujuh Puluh Dua koma Tiga Puluh Tiga Persen*), dengan perincian Anggaran terealisasi sebagai berikut:

Tabel 15
Realisasi Anggaran Tahun 2017

No	Uraian Kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Penyelenggaraan Sidang/Konferensi/Seminar Internasional	19.320.004.000	8.825.984.760	10.494.019.240
2	Penyelenggaraan Sidang/Konferensi/Seminar Regional	3.875.718.000	2.699.923.165	1.175.794.835
3	Pelaksanaan Kerjasama Organisasi Internasional	21.138.816.000	17.690.279.062	3.448.536.938
4	Pelaksanaan Kerjasama Organisasi Regional	17.266.998.000	14.684.968.959	2.582.029.041
5	Pelaksanaan Kerjasama Bilateral	39.845.594.000	26.253.926.606	13.591.667.394
6	Pelaksanaan Panja BKSAP	4.661.782.000	1.041.645.400	3.620.136.600
7	Penyelenggaraan Sekretariat Organisasi Regional/Internasional	419.231.000	-	419.231.000
8	Pelaksanaan Peran Diplomasi Anggota DPR RI	78.968.624.000	62.965.781.720	16.002.842.280
Total		185.496.767.000	134.162.509.672	51.334.257.328

Penyelenggaraan sidang/Konferensi Internasional di dalam negeri terdiri dari :

1. Penyelenggaraan Sidang ke-9 *ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) Caucus* pada tanggal 17 – 20 Juli 2017 di Fairmont Jakarta.
2. *World Parliamentary Forum on Sustainable Development* untuk pertama kalinya pada tanggal 6-7 September 2017 di Nusa Dua – Bali.
3. Pertemuan *GOPAC Annual Board Meeting* pada tanggal 8 September 2017 di Nusa Dua - Bali untuk membahas kelanjutan organisasi *Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC)* ke depan.

Pengiriman Delegasi 2017

Pengiriman Delegasi BKSAP ke Luar Negeri terdiri dari:

1. Pengiriman Delegasi DPR RI ke Konferensi/Sidang-sidang yang terkait dengan kerja sama organisasi Parlemen internasional yang meliputi IPU, PUIC, GOPAC, IPAIT, PGA, IPSS, CDDE, badan-badan dibawah PBB dan organisasi internasional lainnya;
2. Pengiriman Delegasi DPR RI ke Konferensi/Sidang-sidang yang terkait dengan kerja sama organisasi Parlemen regional yang meliputi AIPA, APA, APPF, AEYPM, AFPPD, APPCED, ASEP, FEALAC, APDA dan organisasi regional lainnya; dan
3. Pengiriman Delegasi Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI – Parlemen Negara Sahabat ke Negara-negara sahabat.
4. Pengiriman Delegasi kunjungan Individu ke berbagai negara sebagai bentuk diplomasi parlemen secara perorangan.

Panitia Kerja (Panja) BKSAP

Biro KSAP telah memberikan dukungan bagi BKSAP DPR RI untuk pembentukan Panitia Kerja (Panja di Tahun 2017 dengan), yaitu:

1. Panitia Kerja (Panja) BKSAP tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA); dan
2. Panitia Kerja (Panja) BKSAP tentang Kegiatan Agenda Pembangunan Berkelanjutan.

Realisasi anggaran sepanjang tahun 2017 tidak tercapai maksimal karena:

- Kunjungan GKSB baru dapat terlaksana kembali setelah APBN-P disetujui, sehingga pelaksanaannya baru bisa dimulai pada bulan Oktober 2017.

- Beberapa GKSB tidak terlaksana kunjungannya disebabkan parlemen terkait tidak bisa menerima kunjungan sesuai jadwal yang diajukan dan banyak anggota GKSB yang tidak bisa ikut kunjungan karena bentrok jadwal kunjungan dengan acara kunjungan AKD lainnya maupun acara Partai yang tidak bisa ditinggalkan
- Realisasi anggaran untuk kunjungan kerja individu pada saat-saat terakhir, banyak anggota yang membatalkan rencana kunjungan disebabkan berbagai kesibukan di AKD maupun di Partai. Setidaknya ada 12 delegasi yang batal berangkat dengan perkiraan anggaran sekitar Rp. 10 Milyar yang tidak jadi terlaksana.

Selain penggunaan Anggaran dengan Satuan Kerja Dewan sebagaimana tersebut diatas, kinerja Biro Kerjasama Antar Parlemen juga didukung oleh Anggaran dengan Satuan Kerja Sekretariat yang berjumlah **Rp 1.071.747.000,-** (*Satu Milyar Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah*)

Dari jumlah tersebut, sampai dengan bulan Desember 2017 atau sampai dengan Triwulan IV, telah terealisasi sebesar **Rp 730.347.400,-** (*Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah*) atau **68,15 %** (*Enam Puluh Delapan koma Lima Belas Persen*).

Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan IV digunakan untuk pelaksanaan kegiatan berikut :

- 1) Perumusan Bahan Kebijakan Biro KSAP;
- 2) Fasilitasi Kerja Sama Organisasi Internasional, Regional, Bilateral dan Administrasi Kegiatan Luar Negeri Anggota;
- 3) Pelaksanaan Pengiriman Penerjemah dalam rangka pengembangan SDM, dan kegiatan-kegiatan pendidikan serta seminar di daerah dan luar negeri.

Catatan Realisasi Satker Setjen:

- 1) Padatnya kegiatan Satker Dewan mengakibatkan kurang maksimalnya penyerapan anggaran pada Satker Setjen sampai dengan Triwulan IV;
- 2) Padatnya kegiatan Satker Dewan, maka waktu untuk merealisasikan Anggaran Sekretariat hanya pada saat masa resses.

BAB IV

PENUTUP

Secara umum tujuan, sasaran, dan kegiatan Biro KSAP tahun 2017 telah dilaksanakan dengan baik, semua kegiatan yang dilaksanakan telah memberikan kontribusi positif pada visi dan misi Biro KSAP. Namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan kepada Anggota Dewan untuk lebih baik lagi. Mengenai keberhasilan, hambatan dan cara pemecahan masalahnya dapat dilihat sebagai berikut:

A. KEBERHASILAN

Keberhasilan yang dicapai antara lain:

1. Meningkatnya kualitas bahan-bahan terkait dengan substansi mengenai isu-isu bilateral, regional dan internasional;
2. Meningkatnya kuantitas dukungan kegiatan kerjasama antar parlemen;
3. Meningkatnya kualitas pelaksanaan alih bahasa/penerjemahan;
4. Meningkatnya kuantitas dukungan kepada DPR RI dalam pelaksanaan kunjungan individu Anggota DPR RI dalam rangka diplomasi parlemen

B. HAMBATAN DAN MASALAH

Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan, Biro KSAP telah berupaya maksimal dalam memberikan dukungan teknis, administratif dan substansi kepada klien utama kepada Pimpinan DPR RI, Pimpinan dan Anggota BKSAP, dan anggota DPR lainnya yang tergabung dalam GKSB dan yang melakukan diplomasi individu. Ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena dinamika agenda DPR yang mengakibatkan serapan anggaran tidak maksimal dan selain itu tidak dipungkiri masih ada catatan dari Anggota Dewan dalam hal kualitas materi yang disiapkan, dan kecepatan serta ketepatan penyiapan hal-hal teknis lainnya.

Hal ini disebabkan oleh:

1. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM pegawai
Saat ini jumlah SDM di Biro KSAP belum sesuai dengan beban kerja. Kemudian, terkait erat dengan tugas dan fungsi Biro KSAP yang utamanya melakukan analisis terhadap beragam isu-isu bilateral/regional/internasional; memberikan dukungan untuk persidangan di dalam maupun di luar negeri; serta dukungan penerjemahan baik lisan maupun tertulis, masih kurang staf yang memiliki penguasaan analisis yang baik serta bahasa Inggris yang sempurna dan pengetahuan bahasa asing lainnya dengan baik, disamping kompetensi dan penguasaan ilmu-ilmu lain yang baik pula. Hal itu antara lain disebabkan karena sebagian staf yang ditugaskan di Biro KSAP tidak memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan di Biro KSAP.
2. Kurangnya kordinasi, baik antar unit di BKSAP sendiri, dengan unit kerja di luar BKSAP maupun dengan instansi luar. Hal ini terjadi antara lain karena volume kegiatan yang cukup banyak yang menyita sebagian besar waktu yang ada, sehingga tidak tersedia cukup waktu yang memadai untuk kegiatan koordinasi.
3. Dukungan teknologi dan sarana/prasarana yang kurang memadai. Semua pegawai di Biro KSAP telah disediakan sarana komputer, namun tidak semuanya dapat berfungsi dengan baik. Beberapa komputer yang tersedia masih belum maksimal untuk mengejar kecepatan dalam bekerja. Akses internet sudah disediakan, namun kadangkala masih terjadi putus sambung. Ruang kerja yang tersedia sangat terbatas sehingga mempengaruhi semangat kerja pegawai, karena berkas-berkas banyak bertumpuk tanpa ada ruangan yang cukup memadai untuk menampungnya.
4. Distorsi atas perencanaan / pelaksanaan
Kebijakan yang berubah sewaktu-waktu, mengakibatkan kendala dalam layanan di bidang substansi maupun teknis, terutama dalam hal pengiriman delegasi ke luar negeri maupun penerimaan tamu-tamu delegasi dari parlemen luar negeri, misalnya pembatalan kunjungan ke luar negeri maupun pembatalan kunjungan tamu yang akan datang yang pemberituannya begitu singkat menjelang

pelaksanaan kegiatan. Perubahan atas perencanaan kegiatan mengakibatkan penyerapan anggaran yang tidak sesuai rencana.

C. PEMECAHAN MASALAH

Untuk pemecahan masalah yang dihadapi perlu dilakukan dengan cara:

1. Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI perlu menempatkan staf yang tepat sesuai antara latar belakang pendidikan maupun ketrampilan dengan tugas pokok dan fungsi BKSAP.

Catatan: Hal ini sudah disampaikan pada rekomendasi tahun 2017 namun belum terlaksana.

2. Peningkatan kuantitas SDM yang memiliki penguasaan substansi tentang isu – isu hubungan internasional baik bilateral, regional maupun internasional, serta disiplin ilmu lainnya melalui diklat/sekolah.
3. Penyelesaian penyusunan Standard Operation Procedure (SOP) untuk kegiatan yang belum ada SOP, dan penyusunan panduan teknis untuk kegiatan lain yang diperlukan.
4. Mengintensifkan koordinasi dengan unit-unit kerja terkait dan beragam pemangku kepentingan.
5. Untuk peningkatan penyerapan anggaran, perlu dioptimalkan dalam penyusunan *cash planning* serta kegiatan monitoring pada setiap bulannya serta melakukan revisi anggaran jika dibutuhkan dalam upaya meningkatkan optimalisasi penggunaan anggaran. Selain itu juga dibutuhkan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan Pimpinan dalam hal memberi informasi terkait kegiatan-kegiatan yang belum terlaksana guna mendapatkan arahan lebih lanjut.
6. Pengembangan teknologi informasi (TI) dalam rangka peningkatan pelayanan kepada DPR-RI dan masyarakat, yaitu dengan updating database referensi BSAKP, pemuatan informasi terbaru tentang BKSAP melalui web site DPR RI baik dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia;
7. Peningkatan sarana/prasarana yang memadai dan *updated* untuk menunjang seluruh kegiatan BKSAP.

LAMPIRAN I

Data Kegiatan Sidang-sidang Internasional Tahun 2017

Masa Persidangan III Sidang 10 Januari – 24 Feb 2017 Reses 25 Feb – 14 Maret 2017		
1.	<i>The 12th Session of the Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) and other related meetings</i> 23 – 30 Januari 2017, Bamako, MALI	1
2.	Delegasi DPR RI ke <i>Konrad-Adenauer-Stiftung Young Political (KASYP)- Leaders Caucus Meeting 2017 for Sustainable Development Goals (SDGs)</i> pada tanggal 2 s.d. 5 Januari 2017 di Siem Reap, Kamboja	2
3.	Seminar yang bertema “ <i>Protecting the decision 2334, a step toward victory</i> ” 2 – 7 Februari 2017 di Istanbul, Turki	3
4.	Delegasi DPR RI ke <i>The Sixth International Conference for Supporting the People of Palestine</i> 20 - 22 Februari 2017 Teheran. Republik Islam Iran	4
5.	Delegasi DPR RI ke <i>The 38th Session of the Steering Committee (SC) of the PCWTO</i> pada tanggal 9 Maret 2017 di Brussels, Belgia	5
Masa Persidangan IV Sidang 15 Maret – 28 April 2017 Reses 29 April – 17 Mei 2017		
6.	<i>The 6th Global Economic Summit</i> yang bertema “ <i>Women Empowerment: Entrepreneurship, Innovation & Capacity Building</i> ” tanggal 27-29 Maret 2017 di Mumbai, INDIA	1
7.	<i>The 136th Assembly of the Inter-Parliamentary Union and Related Meetings</i> 1-5 April 2016 di Dhaka, Bangladesh	2
8.	Delegasi DPR RI ke sidang <i>Women in Parliaments Global Forum (WIP) G20 Roundtable : “Digitalisation ; Policies for a Digital Future”</i> pada tanggal 5 s.d. 6 April 2017 di Dusseldorf, Republik Federal Jerman	3
9.	Delegasi DPR RI ke <i>Regional Seminar on Achieve the Sustainable Development Goals for Parliaments in the Asia-Pacific Region</i> pada tanggal 11 s.d 13 Mei 2017 di Ho Chi Minh City, Viet Nam	4
10.	Delegasi DPR RI ke <i>The 4th World Forum on Intercultural Dialogue (WFID)</i> dengan tema “ <i>Advancing Intercultural Dialogue New Avenues for Human Security, Peace and Sustainable Development</i> ” 5 – 6 Mei 2017 di Baku, Azerbaijan	5
Masa Persidangan V Sidang 18 Mei – 27 Juli 2017 Reses 28 Juli – 15 Agustus 2017		

11.	Delegasi DPR RI ke <i>The 2nd Global Legialative Opennes Conference</i> dengan tema “ <i>Building Citizen Trust through Openness and Engagement</i> ” pada tanggal 19 s.d. 20 Mei 2017 di Verkhovna Rada Kyiv, Ukraina	1
12.	Delegasi DPR RI menghadiri <i>the Committee on Middle East Questions of Inter-Parliamentary Union (IPU)</i> yang bertema <i>The Second Roundtable on Water</i> 6 -7 Juli 2017 di Jenewa, Swiss	2
13.	Delegasi DPR RI menghadiri <i>World Justice Project’s (WJP) Inaugural Anti-Corruption Commissions Symposium</i> sebagai Pembicara pada tanggal 10-13 Juli 2017 di The Haque, Belanda.	3
14.	Delegasi DPR RI menghadiri <i>Parliamentary side event at the United Nations High Level Political Forum (HLPF)</i> tanggal 17 s.d 19 Juli 2017 di New York, USA	4
Masa Persidangan I Sidang 16 Agustus – 27 Oktober 2017 Reses 28 Oktober – 14 November 2017		
15.	Delegasi DPR RI ke <i>Meeting of the Excutive Board of the League of Parliamentarians for Al-Quds</i> tanggal 13 s.d. 17 September 2017 di Istanbul, Turki	1
16.	Delegasi DPR RI menghadiri <i>The Annual WTO Public Forum 2017</i> yang akan diselenggarakan pada tanggal 26 s.d. 28 September 2017 di Jenewa, Swiss	2
17.	Delegasi DPR RI ke <i>The 3RD MIKTA (Mexico, Indonesia, Korea, Turkey and Australia) Speaker’s Consultation</i> 28 s.d. 29 September 2017 di Istanbul, Turki	3
18.	Delegasi DPR RI ke <i>the 38th Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) Executive Committee</i> Tanggal 7-8 Oktober 2017 di Teheran, Republik Islam Iran	4
19.	Delegasi DPR RI ke <i>Meeting of the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) Global Parliamentary Network</i> 11 s.d. 12 Oktober 2017 di Paris, Perancis	5
20.	<i>The 137th Assembly of the Inter-Parliamentary Union and Related Meetings</i> tanggal 14-18 Oktober 2017 di St. Petersburg, Rusia	6
21.	Delegasi DPR RI ke <i>Seventh Conference of States Parties to the United Nations Convention on Against Corruption</i> dan Sidang <i>Seventh Forum of Parliamentarians</i> tanggal 5 – 10 November 2017 di Wina, Austria	7
Masa Persidangan II Sidang 15 November – 13 Desember 2017 Reses 14 Desember 2017 – 8 Januari 2018		
22.	Delegasi DPR RI menghadiri <i>the 23rd Session of the Conference of the Parties to the United Nations Convention on Climate Change (COP 23)</i> dan	1

	Sidang <i>Parliamentary Meeting on the occasion of the United Nations Climate Change Conference</i> tanggal 10 s.d 16 November 2017 di Bonn, Jerman	
23.	Delegasi DPR RI ke <i>The Fourth Inter-Parliamentary Union (IPU) Global Conference of Young Parliamentarians</i> tanggal 17-19 November 2017 di Ottawa, Kanada	2
24.	Delegasi BKSAP DPR RI untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (<i>SDGs</i>) dalam rangka kunjungan teknis ke Konfederasi Swiss tanggal 17 - 23 November 2017	3
25.	Delegasi DPR RI ke <i>Women Political Leaders (WPL) Annual Global Summit</i> 27 November - 2 Desember 2017 di Reykjavik, Islandia	4
26.	Delegasi BKSAP DPR RI untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (<i>SDGs</i>) dalam rangka kunjungan teknis ke Konfederasi Swiss tanggal 2 - 8 Desember 2017	5
27.	Delegasi DPR RI menghadiri <i>Buenos Aires Session of the Parliamentary Conference on the WTO</i> dan <i>The 11th World Trade Organization (WTO) Ministerial Conference</i> 8 s.d.4 Desember 2017 di Buenos Aires, Argentina	6
28.	Delegasi DPR RI ke Pertemuan <i>Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) Presidential Troika and the Extraordinary Meeting on Standing Committee on Palestine</i> 17-19 Desember 2017 Teheran, Republik Islam Iran	7
29.	Delegasi DPR RI ke <i>Meeting of the Executive Committee of the League of Parliamentarians for Al-Quds</i> tanggal 20 - 22 Desember 2017 Istanbul, Turki	8

LAMPIRAN II :

Data Kegiatan Sidang-sidang Regional Tahun 2017

Masa Persidangan III Sidang 10 Januari – 24 Feb 2017 Reses 25 Feb – 14 Maret 2017		
1.	<i>The 25th Annual Meeting of Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) tanggal 13 - 20 Januari 2017 di Nadi - Fiji</i>	1
2.	<i>Asian Parliamentary Assembly (APA) Standing Committee on Political Affairs, tanggal 14 - 15 Maret 2017 di Islamabad – Pakistan</i>	2
Masa Persidangan IV Sidang 15 Maret – 28 April 2017 Reses 29 April – 17 Mei 2017		
3.	<i>Asian Parliamentary Assembly (APA) Standing Committee on Economic and Sustainable Development Affairs, tanggal 25 - 26 April 2017 di Manama – Bahrain</i>	1
4.	<i>ASEAN Leaders - AIPA Representatives Interface Meeting, tanggal 27 - 30 April 2017 di Manila - Filipina</i>	2
Masa Persidangan V Sidang 18 Mei – 27 Juli 2017 Reses 28 Juli – 15 Agustus 2017		
5.	<i>Asian Parliamentary Assembly (APA) Standing Committee Meeting on Staff and Financial Regulations, tanggal 21 - 24 Mei 2017 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab</i>	1
6.	<i>The 2nd Meeting of Speakers of Eurasian Countries' Parliaments tanggal 26 -28 Juni 2017 di Seoul, Korea Selatan</i>	2
7.	<i>The 13th Meeting of the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIFOCOM) to Combat the Drug Menace, tanggal 4 - 8 Juli 2017 di Manila – Filipina</i>	3
Masa Persidangan I Sidang 16 Agustus – 27 Oktober 2017 Reses 28 Oktober – 14 November 2017		
8.	<i>Asian Parliamentary Assembly (APA) Standing Committee Meeting on Social and Cultural Affairs, tanggal 31 Agustus - 2 September 2017 di Thimphu – Bhutan</i>	1
9.	<i>Sidang Umum AIPA ke 38 tanggal 14 – 20 September 2017 di Manila, Filipina</i>	2
10.	<i>Executive Council Meeting of Asian Parliamentary Assembly (APA), tanggal 1- 4 Oktober 2017 di Phnom Penh – Kamboja</i>	3

11.	Kunjungan Kerjasama dalam rangka menindaklanuti resolusi-resolusi AIPA tanggal 22-28 Oktober 2017 ke Sydney – Australia	4
Masa Persidangan II Sidang 15 November – 13 Desember 2017 Reses 14 Desember 2017 – 8 Januari 2018		
12.	Sidang Pleno ke-10 <i>Asian Parliamentary Assembly (APA)</i> , tanggal 19 - 25 November 2017 di Istanbul - Turki.	1
13.	Kunjungan Kerja dalam rangka menindaklanjuti resolusi-resolusi AIPA tanggal 3 – 9 Desember 2017 ke Swedia	2

LAMPIRAN III**Data Rapim BKSAP, Friendly Talk, Courtessy Call BKSAP DPR RI****Tahun 2017**

Masa Persidangan III			
Sidang 10 Januari – 24 Feb 2017			
Reses 25 Februari – 14 Maret 2017			
1.	Rapat Pimpinan BKSAP DPR RI (membahas program kerja dan kegiatan BKSAP 2017)	Rabu, 11 Januari 2017 Pukul 10.30 WIB	1
2.	Rapat Intern GKS B Kuba (Pembahasan Program Kerja GKS B DPR RI - Parlemen Portugal)	Kamis, 26 Januari 2017 Pukul 12.00 WIB	2
3.	Ketua BKSAP menerima Dubes UE	Kamis, 26 Januari 2017 pukul 10.00 WIB	3
4.	Rapat Intern GKS B – Parlemen Kuba (Membicarakan Program Kerja Kunjungan GKS B DPR RI – Parlemen Kuba dan Rencana Jadwal Kunjungan)	Selasa, 31 Januari 2017 Pukul 11.00 WIB	4
5.	Rapat Kunjungan Teknis BKSAP ke Equador (Pembahasan Program Kerja Kunjungan Teknis BKSAP ke Equador)	Rabu, 1 Februari 2017 pukul 11.00 WIB	5
6.	Rapat Intern GKS B – Parlemen Azerbaijan (Pembahasan program kerja GKS B DPR RI – Parlemen Azerbaijan)	Senin, 6 Februari 2017 pukul 12.00 WIB	6
7.	Pemutaran Film Lorong tak berujung, (GKS B Azerbaijan mengundang perwakilan dari perguruan tinggi di Jakarta dan sekitarnya)	Jumat, 17 Februari 2017 Pukul 13.00 WIB	7
8.	Rapat Pleno BKSAP DPR RI (Membahas Program Kerja dan Kegiatan BKSAP DPR RI)	Selasa, 21 Februari pukul 12.00 WIB	8
9.	Rapim BKSAP DPR RI (Membahas Program Kerja dan Kegiatan BKSAP 2017)	Rabu, 22 Februari 2017 pukul 12.00 WIB	9
10.	Rapat Intern GKS B DPR RI – Parlemen Kuba (Membicarakan Program kerja Kunjungan GKS B DPR RI – Parlemen Kuba dan rencana jadwal kunjungan)	Selasa, 14 Maret 2017 pukul 12.00 WIB	10

11.	Rapat Intern GKSB DPR RI – Parlemen Hongaria (membahas Program Kerja GKSB DPR RI – Parlemen Hongaria)	Selasa, 14 Maret 2017 pukul 15.00 Wib	11
Masa Persidangan IV Sidang 15 Maret – 28 April 2017 Reses 29 April – 17 Mei 2017			
12.	Courtesy Call dengan Tamerlan Garayev (Ambassador of the Republic of Azerbaijan to the Republic of Indonesia) diterima oleh Ketua BKSAP DPR RI Dr. Hj. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si.	Selasa, 21 Maret 2017 pukul 11.00 Wib	1
13.	Rapat Internal GKSB Bahrain (persiapan kunjungan Ketua Parlemen Bahrain)	Kamis, 23 Maret 2017	2
14.	Rapat Intern GKSB DPR RI – Parlemen Perancis (Membahas persiapan kunjungan Parlemen Perancis ke DPR RI pada tanggal 29 Maret 2017)	Senin, 27 Maret 2017 pukul 13.00 WIB	3
15.	Ketua DPR RI dan GKSB DPR RI menerima Parlemen Perancis (membahas hubungan Bilateral Indonesia – Perancis)	Rabu, 29 Maret 2017 pukul 10.30 WIB	4
16.	Rapat GKSB DPR RI – Parlemen Kuba (Rapat dengan Instansi terkait mengenai persiapan kunjungan GKSB DPR RI – Parlemen Kuba ke Kuba)	Rabu, 29 Maret 2017 pukul 11.00 WIB	5
17.	Friendly Talk Delegasi Parlemen Bahrain dengan GKSB Bahrain dan BKSAP	Kamis, 30 Maret 2017	6
18.	Rapat Intern GKSB DPR RI – Parlemen Kuba dengan Garuda Indonesia (Membahas persiapan kunjungan GKSB Parlemen Kuba ke Kuba)	Senin, 3 April 2017 pukul 11.00 WIB	7
19.	Rapat Intern GKSB DPR RI – Parlemen Slowakia (Membahas program kerja GKSB DPR RI – Parlemen Slowakia)	Rabu, 5 April 2017 pukul 11.00 WIB	8
20.	Friendly Talk GKSB DPR RI – Parlemen Austria dengan Chairman of bilateral Parliamentary Friendship – Group between Austria and South, Southeast Asia, Australia dan Oceania (membahas Kerjasama bilateral Indonesia - Austria)	Kamis, 6 April 2017 pukul 11.00 WIB	9
21.	Friendly Talk Pertemuan Ketua BKSAP DPR RI Dr. HJ. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si dengan H.E.	Selasa, 18 April 2017 pukul 11.00 WIB	10

	Mr. Fransisco Fontan Pardo (Ambassador of European Union for ASEAN).		
22.	Rapat Intern GKSBB DPR RI – Parlemen Sudan (membahas rencana dan program Kunjungan Kerja GKSBB DPR RI ke Sudan.	Jumat, 28 April 2017 Pukul 10.00 WIB	11
Masa Persidangan V Sidang 18 Mei – 27 Juli 2017 Reses 28 Juli – 15 Agustus 2017			
23.	Courtesy Call BKSAP DPR RI bersama Komisi I, IV dan VI DPR RI dengan Delegasi International Trade Committee European Parliament	Selasa, 23 Mei 2017 Pukul 10.00 WIB	1
24.	Courtesy Call GKSBB DPR RI – Parlemen Republik Rakyat Tiongkok dengan Komisi Urusan Internal dan Yudisial NPC RRT (Membahas kerjasama bilateral Indonesia – RRT)	Selasa 23 Mei 2017 Pukul 10.30 WIB	2
25.	Rapat Intern GKSBB DPR RI – Parlemen India (Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua GKSBB DPR RI – Parlemen India, Membahas Program Kerja GKSBB DPR RI – Parlemen India)	Senin, 5 Juni 2017 Pukul 11.00 WIB	3
26.	Friendly Talk antara GKSBB DPR RI dengan Parlemen Jepang (Pertemuan Bilateral antara GKSBB DPR RI Parlemen Jepang dengan Duta Besar Jepang, H.E. Masafumi Ishii)	Selasa, 6 Juni 2017 Pukul 11.00 WIB	4
27.	Courtesy Call GKSBB DPR RI – Parlemen Kuba dengan Duta Besar Kuba untuk Indonesia, H.E. Madam Nirsia Castro Guevara (Meminta masukan GKSBB Kuba yang telah melaksanakan Kunjungan Ke Kuba pada tanggal 20 – 26 Mei 2017)	Rabu, 14 Juni 2017 Pukul 10.00 WIB	5
28.	Courtesy Call Dubes Meksiko, HE. Mr. Gonzalo Mendoza Negeri dengan Ketua BKSAP.	Senin, 19 Juni 2017 pukul 14.00 WIB	6
29.	Courtesy Call Dubes Meksiko, HE. Mr. Frederico Salas Lotfe dengan Ketua BKSAP	Senin, 19 Juni 2017 pukul 13.00 WIB	7
30.	Courtesy Call Dubes Qatar dengan Ketua BKSAP	Kamis, 6 Juli 2017 pukul 14.00 WIB	8
31.	Friendly Talk Delegasi Parlemen Afrika Selatan dengan BKSAP dan Komisi X dan BKSAP	Senin, 10 Juli 2017 Pukul 13.00 WIB	9
32.	Friendly Talk Delegasi Parlemen Afrika Selatan dengan BKSAP dan Komisi V	Senin, 10 Juli 2017 Pukul 15.00 WIB	10

33.	Friendly Talk Delegasi Parlemen Ceko dengan Wakil Ketua DPR RI dan BKSAP	Selasa, 18 Juli 2017 Pukul 10.00 WIB	11
34.	Pleno BKSAP	Kamis, 20 Juli 2017 Pukul 09.30 WIB	12
35.	Friendly Talk Delegasi Parlemen Ceko dengan BKSAP dan Komisi XI	Kamis, 20 Juli 2017 Pukul 10.00 WIB	13
36.	Rapat Intern GKSB Makedonia	Senin, 24 Juli 2017 pukul 12.00 WIB	14
37.	Courtesy Call Dubes Iran dengan Ketua BKSAP	Selasa, 25 Juli 2017 pukul 14.00 WIB	15
38.	Courtesy Call Dubes Oman dengan Ketua BKSAP	Selasa, 25 Juli 2017 pukul 15.00 WIB	16
39.	Rapat Intern GKSB Australia	Selasa, 25 Juli 2017 pukul 15.00 WIB	17
Masa Persidangan I Sidang 16 Agustus – 27 Oktober 2017 Reses 28 Oktober – 14 November 2017			
40.	Rapat Intern GKSB DPR RI – Parlemen Slovakia (membahas Program Kerja Kunjungan GKSB)	Selasa, 22 Agustus 2017 Pukul 13.00 WIB	1
41.	Rapat Pimpinan BKSAP DPR RI	Senin, 28 Agustus 2017 Pukul 15.00 WIB	2
42.	Rapat GKSB DPR RI – Parlemen Slovakia (Membahas Persiapan kunjungan kerja GKSB)	Kamis, 7 September 2017 Pukul 13.00 WIB	3
43.	Rapat Intern GKSB DPR RI – Parlemen India (memebahas program kerja kunjungan GKSB)	Senin, 11 September 2017 Pukul 13.00 WIB	4
44.	Ketua BKSAP menerima tamu Vietnam	Senin, 11 September 2017 Pukul 13.00 WIB	5
45.	Rapat Intern GKSB DPR RI – Parlemen Australia (Membahas jadwal kunjungan kerja GKSB)	Selasa, 12 September 2017 Pukul 13.00 WIB	6
46.	Ketua BKSAP menerima Dubes Srilanka	Selasa, 12 September 2017 Pukul 13.00 WIB	7
47.	Courtesy Call GKSB DPR RI – Parlemen India dengan Dubes India	Kamis, 14 September 2017 Pukul 10.00 WIB	8
48.	Rapat Intern GKSB DPR RI – Parlemen Rusia (membahas program kerja dan kunjungan GKSB)	Senin, 2 Oktober 2017 Pukul 15.00 WIB	9

49.	Rapat Intern GKSB DPR RI – Parlemen Makedonia (membahas Program kerja dan rencana kunjungan GKSB)	Selasa, 3 Oktober 2017 Pukul 12.00 WIB	10
50.	Rapat GKSB DPR RI - Parlemen Ukraina (membahas jadwal kunjungan GKSB)	Kamis, 5 Oktober 2017 Pukul 14.00 WIB	11
51.	Rapat Pimpinan BKSAP DPR RI (membahas program kerja BKSAP)	Kamis, 5 Oktober 2017 Pukul 15.00 WIB	12
52.	Ketua BKSAP DPR RI menerima tamu Kemlu (OISOSBUD)	Jumat, 6 Oktober 2017 Pukul 10.00 WIB	13
53.	Rapat Intern GKSB DPR RI – Parlemen Madagaskar (membahas program kerja GKSB)	Rabu, 25 Oktober 2017 Pukul 14.00 WIB	14
54.	Courtesy Call Ketua BKSAP dengan Dubes Arab Saudi	Kamis, 2 November 2017 pukul 13.00 WIB	15
55.	Courtesy Call Ketua BKSAP dengan Dubes Korea Utara	Kamis, 2 November 2017 pukul 14.00 WIB	16
56.	Ketua BKSAP menerima UNHCR	Jumat, 3 November 2017 pukul 13.00 WIB	17
57.	Courtesy Call Ketua BKSAP dengan Dubes Turki	Jumat, 3 November 2017 pukul 14.00 WIB	18
58.	Ketua BKSAP menerima CDA Kedutaan Georgia	Rabu, 8 November 2017 Pukul 11.00 Wib	19
59.	Courtesy Call Ketua BKSAP dengan Duta Besar Oman	Rabu, 8 November 2017 Pukul 13.00 WIB	20
60.	Pimpinan BKSAP menerima WFD Indonesia	Rabu, 8 November 2017 Pukul 14.00 WIB	21
Masa Persidangan II Sidang 15 November – 13 Desember 2017 Reses 14 Desember 2017 – 8 Januari 2018			
61.	Rapat Intern GKSB Parlemen Rumania	Senin, 20 November 2017 Pukul 13.00 WIB	1
62.	Pimpinan GKSB Parlemen Sudan menerima Dubes Sudan	Selasa, 22 November 2017 Pukul 11.00 WIB	2
63.	Rapat Intern GKSB Parlemen Madagaskar	Kamis, 23 November 2017 Pukul 15.00 WIB	3
64.	GKSB Jepang menerima Wakil Menteri Luar Negeri Jepang	Selasa, 19 Desember 2017 Pukul 11.00 WIB	4

LAMPIRAN IV :

Tabel 14
Data Kegiatan Kunjungan Individu Anggota DPR RI Tahun 2017

NO	NEGARA	TANGGAL KUNJUNGAN	JUMLAH ORANG	JML PER MP
Masa Persidangan III Sidang 10 Januari – 24 Feb 2017 Reses 25 Feb – 14 Maret 2017				
1	Amerika Serikat	3-9 Februari	1	1
2	Azerbaijan	5-11 Februari	6	2
3	Inggris	16-22 Februari	1	3
4	Spanyol	16-22 Februari	5	4
5	Ekuador	18-23 Februari	2	5
6	Inggris	9-15 Maret	6	6
Masa Persidangan IV Sidang 15 Maret – 28 April 2017 Reses 29 April – 17 Mei 2017				
7	Amerika Serikat	15-21 Maret	1	1
8	Ekuador	15-20 Maret	1	2
9	Ekuador	19-25 Maret	3	3
10	Australia	22-28 Maret	3	4
11	Amerika Serikat	23-29 Maret	4	5
12	Malaysia	2-6 April	3	6
13	Rep. Ceko	16-22 April	14	7
14	Afrika Selatan	20-26 April	1	8
15	Kanada	21-27 April	4	9
16	Kroasia	24-30 April	5	10
17	Rusia	10-16 Mei	4	11
18	Mexico	10-16 Mei	9	12
19	Kroasia	14-20 Mei	7	13
Masa Persidangan V Sidang 18 Mei – 27 Juli 2017 Reses 28 Juli – 15 Agustus 2017				
20	Spanyol	18-24 Mei	1	1
21	Kanada	19-25 Mei	12	2
22	Jerman	20-26 Mei	5	3
23	Amerika Serikat	24-30 Mei	8	4

24	Ekuador	1-7 Juni	2	5
25	Argentina	30 Juni-6 Juli	6	6
26	Korea Selatan	4-10 Juli	1	7
27	Inggris	1-7 Juli	5	8
28	Rep. Ceko	8-14 Juli	15	9
29	Swedia	20-26 Juli	1	10
30	Rep. Ceko	20-26 Juli	7	11
Masa Persidangan I				
Sidang 16 Agustus – 27 Oktober 2017				
Reses 28 Oktober – 14 November 2017				
31	Brazil	21-27 Agustus	5	1
32	Argentina	21-27 Agustus	8	2
33	Brazil	22-28 Agustus	7	3
34	Amerika Serikat	28 Agustus-3 Sept	1	4
35	Rep. Ceko	2-8 September	1	5
36	Kazakhstan	11-17 Sept	2	6
37	Amerika Serikat	16-22 Sept	6	7
38	Ekuador	18-24 Sept	8	8
39	Jerman	26 Sept-2 Oktober	1	9
40	Chile	26 Sept-2 Oktober	1	10
41	Mexico	17-23 Oktober	6	11
42	Ekuador	20-26 Oktober	4	12
43	Amerika Serikat	12-18 November	1	13
44	Ekuador	13-19 November	3	14
45	Inggris	13-19 November	2	15
Masa Persidangan II				
Sidang 15 November – 13 Desember 2017				
Reses 14 Desember 2017 – 8 Januari 2018				
46	Kanada	16-22 November	1	1
47	Belanda	19-25 November	2	2
48	Kuba	22-28 November	2	3
49	Inggris	23-29 November	3	4
50	Afrika Selatan	25 Nov-1 Des	5	5
51	Ekuador	26 Nov-2 Des	1	6
52	Amerika Serikat	26 Nov-2 Des	10	7
53	Kuba	26 Nov-2 Des	3	8
54	Inggris	26 Nov-2 Des	1	9

LAMPIRAN V:**Data Pengiriman Delegasi GKSBB (Kerjasama Bilateral) dan Kunjungan Teknis BKSAP
Tahun 2017**

Masa Persidangan III Sidang 10 Januari – 24 Feb 2017 Reses 25 Feb – 14 Maret 2017			
1.	Kunjungan Teknis BKSAP ke EKUADOR	19 – 25 Februari 2017	1
2.	GKSBB DPR RI AZERBAIJAN	18 - 24 Februari 2017	2
Masa Persidangan IV Sidang 15 Maret – 28 April 2017 Reses 29 April – 17 Mei 2017			
3.	Kunjungan Teknis BKSAP ke SENEGAL	9 – 15 April 2017	1
Masa Persidangan V Sidang 18 Mei – 27 Juli 2017 Reses 28 Juli – 15 Agustus 2017			
4.	Kunjungan Teknis BKSAP ke YUNANI	17 – 23 Mei 2017	1
5.	GKSBB DPR RI – PARLEMEN HONGARIA	25 - 31 Mei 2017	2
6.	GKSBB DPR RI – PARLEMEN KUBA	20 - 26 Mei 2017	3
Masa Persidangan I Sidang 16 Agustus – 27 Oktober 2017 Reses 28 Oktober – 14 November 2017			
7.	GKSBB DPR RI – PARLEMEN SLOVAKIA	9- 15 September 2017	1
8.	GKSBB DPR RI – PARLEMEN INDIA	24-30 September 2017	2
9.	GKSBB DPR RI – PARLEMEN SERBIA	3-9 Oktober 2017	3

10.	GKSB DPR RI – PARLEMEN RUSIA	14-20 Oktober 2017	4
11.	GKSB DPR RI – PARLEMEN AUSTRALIA	14 – 20 Oktober 2017	5
12.	GKSB DPR RI – PARLEMEN UKRAINA	21 – 27 Oktober 2017	6
Masa Persidangan II Sidang 15 November – 13 Desember 2017 Reses 14 Desember 2017 – 8 Januari 2018			
13.	GKSB DPR RI – PARLEMEN POLANDIA	17 – 23 Nov 2017	1
14.	GKSB DPR RI – PARLEMEN MADAGASKAR	25 November – 1 Desember 2017	2
15.	GKSB DPR RI – PARLEMEN RUMANIA	27 Nov – 3 Des	3
16.	GKSB DPR RI – PARLEMEN SUDAN	2 – 8 Des 2017	4
17.	GKSB DPR RI – PARLEMEN MAKEDONIA	2- 8 Des 2017	5